

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2019



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2020 dapat disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah pada lampiran II penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk dapat mengukur dan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara optimal dan terpadu antara program kegiatan.

Diharapkan kinerja yang telah tercapai dapat terus dipertahankan dan yang masih belum memenuhi target dapat ditingkatkan melalui daya dukung dan sumber daya manusia yang memadai.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan LKj-IP ini masih terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan realisasi kegiatan dan penyusunan laporan kedepan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta kita semua selalu mendapat limpahan berkah dan hidayah Allah SWT. Aamiin.

Tanjung Redeb, Januari 2021

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Berau**

H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631121 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHSTIAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau	1
1.3 Struktur dan organisasi	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	8
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1 RENCANA STRATEGIS	20
2.1.1 Visi dan Misi	20
2.1.2 Tujuan dan sasaran	24
2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan Program.....	25
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	35
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	39
2.4 Perjanjian Kinerja	48
BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	49
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	52
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	56
3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.....	57
3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dan Kinerja tahun lalu.....	59
3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka Menengah yang terdapat pada dokumen strategis Organisasi	61

3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang telah dilakukan.....	62
3.3.5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	63
3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	63
3.4 Realisasi Anggaran	67
BAB IV. PENUTUP.....	68

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- Rencana Kinerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja Tahunan
- Indikator Kinerja Utama
- Matrik Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- DUK
- Kartu Inventaris Barang

IKHSTIAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKJ-IP ini disusun sebagai tindaklanjut dari menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kinerja pemerintah SKPD.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat terlaksana dengan baik namun disadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan seperti administrasi yang di luar kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Personil yang belum memadai, Penerapan aturan yang kadang tidak sepaham antara pemangku kepentingan dengan OPD pelaksana.

Dengan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diharapkan LKJ-IP ini akan dapat memenuhi unsur – unsur yang dipersyaratkan.